KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : BPK Minta DPR Naikin Anggaran
Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Butuh Biaya Untuk Tambah SDM

BPK Minta DPR Naikin Anggaran

KOMISI XI DPR belum menyetujui usulan penambahan anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 2,71 triliun dari pagu indikatif 2024 sebesar Rp 4,67 triliun. BPK berharap anggaran tahun depan menjadi Rp 7,39 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menyarankan, usulan penambahan anggaran ini diterima saja dulu. Sementara mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan melalui rapat konsultasi BPK dengan Komisi XI DPR sebelum Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 berakhir 14 Juli nanti.

"Hasil pembahasan itu (rapat konsultasi, red) akan kita sampaikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN). Jadi, kami menjalankan amanat Undang-Undang BPK Pasal 35 juga," jelasnya.

Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK tersebut yakni, ayat (1) berbunyi 'Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam APBN'.

Kemudian, ayat (2), 'Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.

Ayat (3), 'Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Menkeu sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN'.

"Komisi XI DPR memahami usulan tambahan untuk diusulkan dalam RAPBN 2024, dan akan disesuaikan dengan ruang fiskal RAPBN tahun 2024," ujar Dolfie saat membacakan salah satu poin kesimpulan rapat kerja bersama BPK.

Sementara, Sekjen BPK Bahtiar Arif menuturkan, pihaknya telah mengajukan proposal anggaran untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 7,39 triliun.

Usulan anggaran ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, mengingat ada tambahan kenaikan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPK sebanyak 1.400 pada tahun 2021. Dan juga penambahan jumlah pemeriksaan di kantor pusat maupun kantor perwakilan.

Namun dari proposal anggaran tersebut, sambungnya, pagu indikatif yang ditetapkan Menkeu bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas sebesar Rp 4,67 triliun. Nilai ini hampir sama dengan pagu tetap BPK Tahun 2023. Pagu indikatif ini terdiri dari program pemeriksaan keuangan negara sebesar Rp 3,86 triliun dan dukungan manajemen Rp 814,9 miliar.

Dari penetapan pagu indikatif ini, pihaknya mengajukan usulan pergeseran untuk menambah program pemeriksaan keuangan negara yang semula Rp 3,86 triliun, menjadi Rp 3,95 triliun.

"Dengan demikian, program dukungan manajemen turun menjadi Rp 719,1 miliar atau 15,39 persen dari total pagu indikatif BPK," jelasnya.

Sementara, rincian per jenis belanja, belanja operasional mendapatkan alokasi Rp 3 triliun lebih. Untuk belanja operasional Rp 953 miliar. Belanja operasional ini sudah termasuk untuk kegiatan perjalanan melakukan pemeriksaan sebesar Rp 669 miliar. ■ KAL